

First Post
admin, admin

Creative Commons - BY -- 2016

Dedication

KPU Provinsi Jawa Barat

Table of Contents

Pekan 1 - April 2016	1
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI & WAKIL BUPATI CIANJUR TERPILIH TAHUN 2015	1
KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI KE KPU PROVINSI JAWA BARAT	2
Pekan II - April 2016	4



Pekan 1 - April 2016

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI & WAKIL BUPATI CIANJUR TERPILIH TAHUN 2015

CIANJUR, Jum'at tanggal 22 Januari 2016, bertempat di Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur (Jl. Ir. H. Djuanda No. 28B) telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 Paska Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 66/PHP.BUP-XIV/2016. dalam proses Penetapan Pasangan calon terpilih ini, KPU Kabupaten Cianjur Memperhatikan beberapa hal dalam penetapan calon terpilih diantaranya adalah:

Salinan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PHP.BUP-XIV/2016, atas perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat Tahun 2015;

Berita Acara KPU Kabupaten Cianjur Nomor 99/BA/XII/2015 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015;

Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Cianjur nomor 2/BA/I/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Periode 2016-2021 Pada Pemilihan Tahun 2015.

KPU Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1/Kpts/KPU-Kab-011.329996/I/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Nomor Urut 2 (dua), Sdr. H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP., SH., M.Si dan Sdr. HERMAN SUHERMAN, ST., M.AP, dengan perolehan suara sebanyak 464.412 (empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua belas) suara atau 49,02% (empat puluh sembilan koma nol dua persen) dari total suara sah sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Terpilih hasil Pemilihan Tahun 2015.

Pelaksanaan rapat pleno terbuka tersebut dikawal ketat oleh aparat kepolisian dari Brimob Polda Jabar, Sabara Polda Jabar dan dari gabungan Polres dan Polsek Cianjur. Rapat pleno berlangsung tertib dan aman meski dilaksanakan sempat mundur setengah jam dari jadwal yang ditetapkan pukul 14.00 WIB. (NS)



KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI KE KPU PROVINSI JAWA BARAT

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan anggota DPR DRI dari komisi II pada hari Selasa 10 November 2015 bertempat di AULA KPU Provinsi Jawa Barat.

Pada kesempatan ini rombongan komisi II DPR RI berjumlah 15 orang yang di pimpin oleh ketua Komisi II DR. Wahidin Halim, M.Si. peserta yang hadir dalam kunjungan kerja ini diantaranya Ketua dan para anggota KPU Provinsi Jawa Barat di dampingi oleh sekretaris dan jajaran sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Ketua KPU Kabupaten/Kota yang sedang melaksanakan Pilkada Serentak. Selain itu acara ini di hadir pula oleh sekretaris Jendral KPU RI Ir. Arif Rahman Hakim MS.

Dalam pemaparan yang di sampaikan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat H. Yayat Hidayat, S.Sos.,M.Si terkait kesiapan KPU dalam penyelenggaraan Pilkada serentak di Jawa Barat tahun 2015 bahwasanya KPU Kabupaten/Kota siap untuk melaksanakan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015 ini. Jumlah personil yang dilibatkan dalam pelaksanaan pilkada ini berjumlah kurang lebih 186.797 yang mana terdiri dari jumlah PPK sebanyak 1155 orang PPK, PPS sebanyak 6477 orang dan KPPS 179.165 orang. Ini sangat berdampak dari jumlah anggaran yang harus disiapkan dalam pelaksanaan pilkada ini. KPU Kabupaten/Kota telah menerima dana hibah dari pemerintah daerah masing-masing yang mana telah termuat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditetapkan.

Terkait dengan pemutakhiran data dan daftar Pemilih Yayat Hidayat menyampaikan bahwa KPU Kabupaten kota telah melaksanakan tahapan Pemutakhiran data dan daftar Pemilih dimana memang masih ada kelemahan dan kekurangan yang dihadapi oleh KPU dalam pendataan daftar pemilih. Pada tanggal 1 s.d 2 Oktober 2015 telah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap oleh 7 (Tujuh) KPU Kabupaten/Kota. Jumlah yang terdaftar dalam DPT untuk 7 Kabupaten/Kota sebanyak 10.482.032 yang terdiri dari laki-laki sebanyak 5.279.494, perempuan sebanyak 5.202.538. Khusus untuk KPU Kabupaten Tasikmalaya ditunda, dikarenakan pada saat itu Kabupaten Tasikmalaya dalam pelaksanaan Pilkada terdapat 1 (satu) calon dan pada saat ini masih dalam proses penetapan DPS. untuk DPTb 1 KPU Kabupaten telah menetapkan jumlah DPTb 1 pada tanggal 28 Oktober 2015, sehingga bagi pemilih yang tidak terdaftar di DPT telah masuk data dalam DPTb 1.

Selanjutnya Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Herminus Kotto dalam penyampaian dihadapan ketua dan Anggota Komisi II DPR RI menyampaikan Kesiapan SDMnya bahwa pada saat ini Bawaslu telah membentuk Panwaslu di 8 (delapan) Kabupaten/kota sampai dengan Pengawas Pemilih Lapangan (PPL), khusus untuk pengawas di TPS masih dalam proses pembentukan yang mana akan ditetapkan pada tanggal 16 November 2015. Dimana jumlah panwas sebanyak 24 orang, Panwascam 693 Orang, 2159 orang PPL dan kurang lebih 25.595 orang pengawas di TPS yang masih dalam proses. Kendala yang dihadapi oleh Bawaslu pada saat ini diantaranya masih ada keterlambatan pembentukan pengawas Pemilih disebabkan faktor regulasi/Kebijakan, keterlambatan pembentukan sekretariat pengawas pemilu dan keterbatasan jumlah tenaga sekretariat khusus untuk Kabupaten/Kota. Ada 3 metode yang di terapkan oleh bawaslu dalam penanganan masalah pengawasan diantara adalah pengawasan



pasif, pengawasan aktif dan pengawasna partisipatif.

Dalam hasil kerja Bawaslu dimana telah menangani beberapa pelanggaran ada diantaranya pelanggaran tahapan pencalonan, yang mana pelanggaran yang telah ditangani sebanyak 27 pelanggaran antara lain pelanggaran administrasi sebanyak 10, pidana 11 dan Sengketa 6. Untuk pemutakhiran data daftar pemilih sebanyak 11 diantaranya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh 3 (tiga) Kabupaten antara lain Kabupaten Karawang, Indramayu dan Sukabumi. Tindaklanjut dari hasil pengawasn pilkada serentak ini bahwa Bawaslu telah menghimpun data dimana jumlah perkara yang masuk ke Bawaslu melalui Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 37 perkara dan 22 tidak dilanjutkan penyeleidikannya, 15 perkara di teruskan ke KPU kabupaten/Kota, 5 Perkara yang belum ada jawaban dan 10 yang telah di tangani oleh KPU Kabupaten/Kota. Untuk pelanggaran Pidana Bawaslu menerima data sebanyak 42 Perkara dan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana sebanyak 39 dan 2 yang telah diserahkan ke pihak kepolisian.

Dalam acara kunjungan ini diharapkan ada masukan yang dapat dibawa oleh anggota Komisi II yang akan dibahas dalam sidang komisi. dalam Reses persidangan pertama ini anggota Komisi II sangat berharap pelaksanaan Pilkada serentak di indonesia dapat berjalan dengan baik tanpa ada kekacauan yang mengakibatkan ketertiban dan keamanan terganggu. Selain itu masukan-masukan yang telah disampaikan oleh ketua KPU dan Bawaslu Jawa Barat dapat di pertimbangkan oleh Komisi II.



Pekan II - April 2016